

RENCANA KERJA (RENJA) PENETAPAN



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**

2024

Jl. Soekarno-Hatta No. 50

Telp. 031-3095331

BANGKALAN 69116

Web : www.dispendukcapilbkl.com

eMail : dispendukcapil@bangkalankab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Soekarno Hatta No. 50 Telp. (031) 3095331
B A N G K A L A N

Kode Pos 69116

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN
188.45/ 07 /433.109/2023
TENTANG
RENCANA KERJA TAHUN 2024
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN

- Menimbang :
- a. bahwa melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 – 2023;
 - b. bahwa Rencana Kerja (Renja) merupakan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, Renstra 2018-2023 dan RKPD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri/Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Surat Edaran Bersama (SEB) No.008/M.PPN/01/2007 – 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007;
 10. Surat Edaran Mendagri No. 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan nomor : 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Tanggal 30 Mei 2017;
17. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan;
18. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Nomor 188.45/20/433.109/2021 tentang Renstra Dispendukpencapil periode 2013-2018

Memperhatikan : Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dalam rangka penyelenggaraan perencanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangkalan
Pada Tanggal 09 Agustus 2023

**KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN**


ZAKARIYA, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660502 199303 1 012

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan perencanaan PD selama satu Tahun dan merupakan penjabaran per Tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja PD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan factor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Bangkalan, 09 Agustus 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANGKALAN



ZAKARIYA, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660502 199303 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Bab I	Pendahuluan..... 1
1.1	Latar Belakang..... 1
1.2	Dasar Hukum..... 2
1.3	Maksud dan Tujuan 4
1.4	Sistematika Penulisan..... 5
Bab II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
	Tahun 2022 8
2.1	Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 8
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD..... 17
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .. 21
2.4	Review terhadap Rancangan Awal 22
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 25
Bab III	Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah 27
3.1	Telaahan terhadap kebijakan Propinsi 27
3.2	Tujuan dan sasaran Renja PD 27
Bab IV	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah 29
4.1	Program dan Kegiatan 29
Bab V	Penutup 33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya akan diproses menjadi Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA PD), RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan PD yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra PD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih riil.

Proses Penyusunan Renja PD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap

persiapan penyusunan, tahap penyusunan orientasi mengenai RKPD dan Renja PD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja PD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bangkalan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 ini berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dan evaluasi kinerja di tahun sebelumnya dan diharapkan bisa memicu kinerja pada tahun yang akan datang.

1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Bangkalan Perubahan Nomor 3 Tahun 2021 atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 1 seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 76;

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2021 Nomor 47 seri E);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2022 Nomor 19/E);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 102 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Tentang Renstra K/L
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RRT/RW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 4/E0);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 Nomor 1/D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
 29. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 14 Seri E)
 30. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)
 31. Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 Nomor 27/E)

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan 2024 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja 2024 yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 serta evaluasi kinerja di tahun 2023 dapat memicu pada rencana kerja tahun yang akan datang.
2. Memberikan arah pembangunan di bidang administrasi kependudukan di Kabupaten Bangkalan selama 1 (satu) tahun kedepan.
3. Membantu dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, RENSTRA 2018-2023 dan RKPD.
4. Meningkatkan kapasitas dan mendorong pengembangan teknologi aplikasi SIAK dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang berkelanjutan dengan kuantitas dan kualitas yang memadai bagi masyarakat.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2024 maka dapat ditetapkan Sistematika penulisan dengan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN 2023

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2024. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Program Tahun 2023

Secara keseluruhan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan tahun 2023 sebesar Rp **6.680.344.585,-** dengan 5 program dan 26 Sub kegiatan. Dari jumlah dana tersebut sampai dengan Triwulan II terealisasi sebesar Rp,**3.802.818.027-** sehingga sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.**2.877.526.558,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar **56,93%**.

2.1.2 Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2024

Sedangkan untuk rencana anggaran tahun depan yakni Anggaran tahun 2024 sesuai dengan usulan RKPD total Belanja Langsung sebesar Rp **6.924.287.380,-** terurai dalam 5 program dan 39 Subkegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta perkiraan capaian program dan Kegiatan Tahun 2024, dalam menjalankan kegiatannya maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

a. Organisasi

Belum fokusnya kinerja utama yang dihadapi sehingga kemungkinan dalam melaksanakan visi dan misi menjadi kurang sempurna dan belum sinkronnya antara perencanaan dan penganggaran.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dikhususkan pada bidang pelayanan administrasi kependudukan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya jumlah pegawai teknis pelaksana sehingga kurang berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah yang ada untuk melayani pemohon.

c. Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan untuk bidang pelayanan masih kurang memadai sehingga pelaksanaan pelayanan dilingkungan Dispenduk dan Pencapil belum bisa dikatakan pelayanan prima.

d. Minat Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan relative masih rendah, hal ini disebabkan karena masyarakat mengurus penerbitan dokumen kependudukannya pada saat dibutuhkan saja.

e. Anggaran

Terbatasnya anggaran sehingga masih banyak kegiatan yang belum terakomodir.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, kedepan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas melalui pendidikan kader, maupun teknis dan penambahan pegawai. Membangun sistem pengumpulan data kinerja dengan baik dan selalu melakukan koordinasi dengan seluruh PD dengan peraturan mengatur mengenai koordinasi yang tegas demi terciptanya perencanaan yang akurat dan uptodate demi terciptanya pembangunan yang berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan pemangku kepentingan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dijelaskan sebagaimana Tabel 2.1 Berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemutakhiran sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmen 050-3708 Tahun 2020										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (pada akhir periode Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja PD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9		
					100%	100%		100%	100%	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	9 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100	3 Dok	6 Dok	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	2 Dok	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	3 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	1 Dok	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 lap							

		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	36 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 Dok	24 Dok	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Lap							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	145 Org	50 Org	50 Org	50 Org	100	50 Org	100 Org	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Org							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	2 Lap	
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	198 Lap	66 Lap	66 Lap	66 Lap	100	66 Lap	132 Lap	
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	66 Lap							
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	14 Lap	6 Lap	7 Lap	7 Lap	100	7 Lap	14 Lap	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Lap							
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	177 Org	135 Org	21 Org	21 Org	61	135 Org	156 Org	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Penyediaan Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket							
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100	2 Unit	4 Unit	
		Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/Buku	172.700 Lbr/Set/Buku				172.700 Lbr/Set/Buku	172.700 Lbr/Set/Buku	
		Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis	3 Jenis	
		Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah Peralatan Penunjang Perekaman dan Pencetakan Dokumen Kependudukan	2 Jenis	2 Jenis				2 Jenis	2 Jenis	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6 Unit	3 Unit	-			3 Unit	6 Unit	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16 Unit	2 Unit	7 Unit	7 Unit	100	2 Unit	9 Unit	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket							
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	33	1 Jenis	1 Jenis	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok							
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	324 Kali	94 Kali	120 Kali	98 Kali	82	94 Kali	192 Kali	

		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%			100%	100%	
	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebel yang diadakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	100	-	5 Unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	5 Unit	5 Unit	8 Unit	-	100	-	5 Unit	
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit							
	Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	2 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Lap							
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	6 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap							
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap							
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	39 Unit	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100	13 Unit	26 Unit	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit							
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57 Unit	19 Unit	19 Unit	19 Unit	95	19 Unit	38 Unit	
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit							
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100	1 Unit	2 Unit	

	Penataan Organisasi	Persentase Dokumen Penataan Organisasi yang tersusun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang tersusun	3 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 Lap	2 Lap	
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	85%	85%	87%	87%		85%	85%	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah Peserta Sosialisasi Pendataan Penduduk		40 Org				40 Org		
		Jumlah jenis Data Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100		1 Jenis	
		Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dok							
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Bahan/Material Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	4 Jenis	4 Jenis				4 Jenis	4 Jenis	
		Jumlah jenis dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	5 Jenis		5 Jenis				5 Jenis	
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dok							
	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	95%	95%				95%	95%	
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah jenis dokumen Kependudukan selain blanko KTP El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang diadakan	6 Jenis	3 Jenis			100	3 Jenis	6 Jenis	
		Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dok							
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	

	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pindah Datang Kependudukan	135 Org	60 Org				60 Org	120 Org	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	30 Kali		12 Kali	12 Kali	100		24 Kali	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	161 Org							
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk 0-18 Tahun yang memiliki Akte	70%	70%	73%			70%	70%	
	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	95%	95%	96%			95%	95%	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Blanko Pelayanan administrasi Akta Kelahiran yang diadakan	172.700 Lbr/Set/Buku	172.700 Lbr/Set/Buku				172.700 Lbr/Set/Buku	172.700 Lbr/Set/Buku	
		Jumlah jenis dokumen pencatatan sipil yang tercatat			1 Jenis	1 Jenis	100			
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis			1 Jenis	1 Jenis	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Sosialisasi Pelayanan Pencatatan Sipil	120 Org	60 Org				60 Org	60 Org	
		Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	150 Org							
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah lokasi yang didatangi terkait Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	10 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	100		4 Lokasi	
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	1 Lap							
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan Pencatatan Sipil	72 Org	24 Org	24 Org	24 Org	100	24 Org	48 Org	

	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	95%	95%	96%	96%		95%	95%	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Lembaga pengguna data kependudukan yang melakukan kerjasama	20 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	100			10 Lembaga
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependuduka	1 Dokumen							
	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Data yang Diinventarisasi Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	1 Laporan							
	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen tentang Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100			1 Dokumen
		Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen							
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi dan Perangkat Pendukung SIAK	95%	95%	95%			95%	95%	
	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peralatan SIAK yang diadakan	25 Jenis	1 Jenis	12 Jenis	11 Jenis	73.33	1 Jenis	12 Jenis	
		Jumlah Paket Fitur Aplikasi Pelayanan Publik yang diadakan			1 Paket Fitur Aplikasi					

		Jumlah Jasa Pemeliharaan SIAK yang dilaksanakan	37 Unit	2 Unit	15 Unit			2 Unit	2 Unit	
		Jumlah laporan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan				1 Laporan	
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan							
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan							
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1 Kali	1 Kali	
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Tenaga Pengelola SIAK yang dilatih	103 Org	33 Org	30 Org	30 Org	100	33 Org	63 Org	
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Laporan							
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis	1 Jenis	
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan yang diadakan	15 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100	5 Jenis	10 Jenis	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Buku Profil yang diadakan	927 Buku	281 Buku	323 Buku	323 Buku	100	281 Buku	604 Buku	
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	320 Dok							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berdasarkan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas. Daerah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan menangani dan mengelola 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Seksi Identitas Penduduk
 - b. Seksi Pindah Datang Penduduk
 - c. Seksi Pendataan Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Seksi kelahiran
 - b. Seksi Perkawinan dan Perceraian
 - c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi kependudukan
 - b. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan
 - c. Seksi Tata kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari
 - a. Seksi Kerjasama
 - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
 - c. Seksi Inovasi Pelayanan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi DISPENDUK PENCAPIL Kabupaten Bangkalan didukung oleh 94 orang Pegawai yang tersebar di masing-masing unit pelayanan, terdiri dari 45 orang Pegawai Negeri Sipil, 49 orang Pegawai Honorer. Secara Struktural Jabatan/Eselonisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Jabatan Eselon II/b 1 orang PNS, Eselon III/a sebanyak 1 orang PNS, Eselon III/b sebanyak 3 orang PNS dan Eselon IV/a sebanyak 15 orang PNS.

Pembangunan bidang administrasi kependudukan telah membawa perubahan yang positif namun perkembangan tersedianya jaringan pelayanan (aplikasi) SIAK Online masih kurang memadai sebagai tolok ukur dari keberhasilan bidang ini belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pada sisi input dapat ditemukan beberapa persoalan. Pertama, persoalan SDM bidang administrasi kependudukan dalam hal kualifikasi teknis pendidikan masih kurang bila dibandingkan terhadap jumlah seluruh pegawai/tenaga pada Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Kedua ketersediaan sarana dan prasarana diantaranya yaitu belum tersedianya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan satu pintu, hal ini tentunya membutuhkan perhatian yang serius dalam pengolahan manajemen kependudukan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan kepemilikan dokumen serta pengawasan dan pengendalian intern dinas masih belum terlaksana untuk capaian kinerja dinas.

Kecilnya anggaran biaya untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bangkalan tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan atau program tersebut secara keseluruhan, sehingga masih membutuhkan bantuan anggaran dari pusat dan propinsi demi tercapainya target SPM.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan Indikator Kinerja kunci.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		80	82	-	-	89.9	-	-	-	
2		Terpenuhinya Pelayanan Kesekretariatan		85	86	-	-	72	-	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Sumber Daya Manusia

Dilihat dari aspek latar belakang pendidikan, Kualifikasi teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih kurang memadai bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pegawainya. Dari tingkatan pendidikan, jumlah pegawai masih didominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat SLTA

2. Fasilitas perkantoran untuk aparatur masih kurang, sejatinya setiap pegawai memiliki sebuah komputer untuk memudahkan pekerjaan mereka. Setiap pejabat struktural seharusnya memiliki sebuah laptop agar memudahkan mereka dalam mempersiapkan tugas yang diberikan atasan sehingga tidak ada antrian dalam penyelesaian tugasnya.
3. Sarana prasarana yang masih terbatas dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat maupun dalam mendukung tugas - tugas intern Dinas.
4. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan meningkatnya aktifitas masyarakat keterlibatan pemerintah sangatlah penting.
5. Banyaknya masyarakat (pemohon) yang mengurus penerbitan dokumen kependudukan harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan masing-masing bidang sehingga dapat tercapai kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang optimal.
6. Pengembangan Teknologi Informatika dan Komunikasi dinilai masih rendah, hal ini ditandai dengan belum optimalnya pengembangan yang digunakan dan tingkat melek masyarakat terhadap TIK serta kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah.
7. Mengikuti kebijakan yang ada pada juknis penggunaan DAK non fisk pelayanan administrasi Kependudukan yang terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya tidak diperbolehkan menggunakan anggaran DAK untuk pengadaan sarana dan prasarana juga kegiatan yang dibatasi pendanaan DAK non fisik dari Direktorat Jendral Kependudukan dan dan pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Review terhadap rancangan awal tahun 2024 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bangkalan	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	5.743.676.712	
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10.10611.450	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	2.897.100	
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dok	1.200.000	
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1.169.900	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 laporan	2.844.450	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	2.500.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%	4.103.267.130	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	50 Org	4.097.992.580	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	4.130.750	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	66 Lap	1.143.800	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	100%	1.733.650	
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Lap	1.733.650	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	237.883.364	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.994.000	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	68.626.210	
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.554.950	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.960.000	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bangkalan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8.890.204	

					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.140.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Laporan	141.718.000	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	100%	21.031.100	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3 Unit	21.031.100	
					Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.315.140.000	
					Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	3.500.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.206.640.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bangkalan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	100%	25.000.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bangkalan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	133.120.000	
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bangkalan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	50 Unit	25.000.000	
					Program Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan KTP EI	99.5%	59.221.900	
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	97.5%	14.221.900	
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen hasil pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	14.221.900	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	5 Dokumen	663.473.835	
					Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	97.5%	-	
					Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen	100.000.000	
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	2 Jenis	45.000.000	
					Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	161.000 orang	45.000.000	
					Program Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	98.4%	141.162.651	
					Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	97.5%	101.760.950	
					Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1 Dokumen	101.760.950	

					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	4 Jenis	25.000.000	
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	150 Orang	25.000.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	1 Kali	14.401.701	
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	1 Laporan	14.401.701	
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	99.152.500	
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	1 Jenis	42.431.500	
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1 Dokumen	15.331.500	
					Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Kab. Bangkalan	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	1 Laporan	27.100.000	
					Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah dokumen pengelolaan Informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Jenis	16.500.000	
					Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	16.500.000	
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	100%	33.221.000	
					Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan	18.221.000	
					Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18 Laporan	15.000.000	
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Kali	7.000.000	
					Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	4 Lap	7.000.000	
					Pengelolaan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	100%	-	
					Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Kab. Bangkalan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	1 Jenis	13.490.000	
					Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Kab. Bangkalan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	320 Buku	13.490.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015-2019, adalah :

"Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas".

Misi :

1. Mengembangkan kebijakan dan system serta menyelenggarakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk menghimpun data kependudukan, menerbitkan identitas dan mensyahkan perubahan status dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
2. Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan;
3. Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk

Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Bangkalan adalah :

"Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil"

Visi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaras dengan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan serta mendukung sasaran yang hendak dicapai, walaupun sasaran yang ingin dicapai lebih luas dan kompleks.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sesuai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023, adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bangkalan Tahun 2024 adalah :

a. Tujuan :

“Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

b. Sasaran :

“Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil “

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN				SASARAN				KET
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
		2024	2025			2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rata-rata persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	91.5	92	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	74.8	74.9	
					Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99.6	99.7	
					Persentase pengelolaan dan pemanfaatan data Kependudukan	100	100	
				Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Indeks kepuasan Masyarakat	85	86	
					Nilai SAKIP	61	61.5	

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan perencanaan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan catatan sipil.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinkes dan Pencapil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan :
 - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 1) Program Pendaftaran Penduduk
Kegiatan :
 - a) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- b) Penataan Pendaftaran Penduduk
 - c) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- 2) Program Pencatatan Sipil
- Kegiatan :
- a) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - b) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - c) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- 3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Kegiatan :
- a) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - b) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - d) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan
- Kegiatan :
- a) Penyusunan Profil Kependudukan

Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diantaranya adalah :

- 5 Program
- 19 Kegiatan
- 35 Subkegiatan

Sedangkan untuk total kebutuhan dana/Pagu indikatif dengan sumber dana yaitu Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum pada tahun 2024 sebesar Rp. 6.924.287.380,-. Semua rumusan program, kegiatan maupun subkegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diiringi oleh pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dituntut untuk menghasilkan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah yang berkualitas terutama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

B. Program Pendaftaran Penduduk

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

2. Penataan Pendaftaran Penduduk
 3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
- C. Program Pencatatan Sipil
1. Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 2. Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 4. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
1. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan

Rencana Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Presentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	Kab. Bangkalan	100%	5.743.676.712	DAU	-	100%	5.803.116.712
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	10.10611.450	DAU	-	100%	36.133.200
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	3 Dok	2.897.100	DAU	-	3 Dok	2.897.100
2.12.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.200.000	DAU	-	1 Dok	1.200.000
2.12.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Bangkalan	1 Dok	1.169.900	DAU	-	1 Dok	1.169.900
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Bangkalan	2 laporan	2.844.450	DAU	-	2 Dok	28.366.200
2.12.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	12 Laporan	2.500.000	DAU	-	12 Dok	2.500.000
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kab. Bangkalan	100%	4.103.267.130	DAU	-	100%	4.037.657.348
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Bangkalan	50 Org	4.097.992.580	DAU	-	50 Org	4.032.382.798
2.12.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Bangkalan	1 Lap	4.130.750	DAU	-	1 Lap	4.130.750
2.12.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Bangkalan	66 Lap	1.143.800	DAU	-	66 Lap	1.143.800
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang tersusun	Kab. Bangkalan	100%	1.733.650	DAU	-	100%	1.733.650
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bangkalan	7 Lap	1.733.650	DAU	-	7 Lap	1.733.650

2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bangkalan	100%	237.883.364	DAU	-	100%	214.693.850
2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	1.994.000	DAU	-	1 Paket	1.995.000
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	68.626.210	DAU	-	2 Paket	68.626.199
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Bangkalan	1 Paket	2.554.950	DAU	-	1 Paket	2.559.401
2.12.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	9.960.000	DAU	-	2 Paket	10.000.000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	2 Paket	8.890.204	DAU	-	2 Paket	8.797.250
2.12.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Dokumen	4.140.000	DAU	-	12 Dokumen	4.500.000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bangkalan	48 Laporan	141.718.000	DAU	-	48 Laporan	118.216.000
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	21.031.100	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Bangkalan	3 Unit	21.031.100	DAU	-	3 Unit	20.000.000
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bangkalan	100%	1.315.140.000	DAU	-	100%	1.319.050.800
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat- Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bangkalan	2 Laporan	3.500.000	DAU	-	2 Laporan	3.500.000
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Laporan	105.000.000	DAU	-	12 Laporan	103.100.800
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Bangkalan	12 Laporan	1.206.640.000	DAU	-	12 Laporan	1.212.450.000
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kab. Bangkalan	100%	25.000.000	DAU	-	100%	-
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Bangkalan	20 Unit	133.120.000	DAU	-	20 Unit	148.847.864
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Bangkalan	50 Unit	25.000.000	DAU	-	40 Unit	25.000.000
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP EI	Kab. Bangkalan	99.5%	59.221.900	DAU	-	87%	-
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang melakukan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk	Kab. Bangkalan	97.5%	14.221.900	DAU	-	96%	-
2.12.02.2.01.01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah dokumen hasil pendataan Penduduk Nonpermanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	14.221.900	DAU	-	1 Dokumen	14.221.900

2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	5 Dokumen	663.473.835	DAU	-	5 Dokumen	693.473.835
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang tercetak	Kab. Bangkalan	97.5%	-	-	-	-	-
2.12.02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain blanko KTP EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	100.000.000	DAU	-	4 Dokumen	100.000.000
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	jumlah kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan	2 Jenis	45.000.000	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.02.2.03.07	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapat Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Bangkalan	161.000 orang	45.000.000	DAU	-	161.000 orang	45.000.000
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan akte kelahiran	Kab. Bangkalan	98.4%	141.162.651	DAU	-	73%	-
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Pemohon yang tercatat terkait dokumen pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan	Kab. Bangkalan	97.5%	101.760.950	DAU	-	96%	-
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah dokumen hasil pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	101.760.950	DAU	-	1 Dokumen	121.760.950
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah jenis kegiatan pencatatan sipil yang diselenggarakan	Kab. Bangkalan	4 Jenis	25.000.000	-	-	-	-
2.12.03.2.02.10	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada pemangku kepentingannya dan masyarakat terkait pencatatan sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	150 Orang	25.000.000	DAU	-	150 Orang	25.000.000
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Bangkalan	1 Kali	14.401.701	DAU	-	1 Kali	-
2.12.03.2.03.02	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Bangkalan	1 Laporan	14.401.701	DAU	-	1 Laporan	14.401.701
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengumpulan, Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	100%	99.152.500	DAU	-	96%	-
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang Disajikan	Kab. Bangkalan	1 Jenis	42.431.500	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	15.331.500	DAU	-	1 Dokumen	15.331.500
2.12.04.2.01.03	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil inventarisasi data untuk kepentingan pembangunan daerah	Kab. Bangkalan	1 Laporan	27.100.000	DAU	-	1 Laporan	27.100.000
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen pengelolaan informasi administrasi Kependudukan yang dikelola	Kab. Bangkalan	1 Jenis	16.500.000	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,	Kab. Bangkalan	1 Dokumen	16.500.000	DAU	-	1 Dokumen	16.500.000

	Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun							
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Perangkat dan Sarana Pendukung	Kab. Bangkalan	100%	33.221.000	DAU	-	95%	-
2.12.04.2.03.03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Laporan	18.221.000	DAU	-	18 Laporan	18.221.000
2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	18 Laporan	15.000.000	-	-	18 Laporan	15.000.000
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Bangkalan	1 Kali	7.000.000	DAU	-	1 Kali	-
2.12.04.2.04.03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Bangkalan	4 Lap	7.000.000	DAU	-	4 Lap	7.000.000
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pengelolaan profil kependudukan yang dilaksanakan	Kab. Bangkalan	100%	-	DAU	-	100%	-
2.12.05.2.01	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Jenis Profil Kependudukan yang tersusun	Kab. Bangkalan	1 Jenis	13.490.000	DAU	-	1 Jenis	-
2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Bangkalan	320 Buku	13.490.000	DAU	-	323 Buku	13.490.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*.

Rencana program dan kegiatan serta lokasi pada rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2024. Begitu pula dengan total pagu program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah sesuai dan selaras dengan RKPD Tahun 2024.

Pencantuman Indikator serta Target Kinerja pada Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah konsisten dengan RKPD Tahun 2024.

Program dan Kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meningkatkan kualitas Pelayanan Publik dalam pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sasaran yang dimiliki Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan diharapkan selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja sehingga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.